



## LAPORAN KINERJA TRIWULAN 2

Unit Kerja  
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada (unit kerja) selama Triwulan 2 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

### A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	52.95	%	0	0
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	A	Predikat	-	-
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	94.50	Nilai	0	0

## **B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2**

### **1. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen ] IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya**

#### **Progress/Kegiatan :**

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan indikator kinerja [IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. Kegiatan yang telah dilakukan dalam priode April s.d Juni 2024 dalam upaya mendukung capaian IKK 1.1. yaitu :

1. Pelaksanaan Pendampingan Kepada Satuan Pendidikan yang Belum Mengakses Rapor Pendidikan oleh UPT Jenjang PAUD, SD dan SMP
2. Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan Mei Tahun 2024
3. Pendampingan Supervisi/Visitasi Gerakan Sekolah Sehat ke Satuan Pendidikan Sekolah Binaan di 33 Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP
5. Gap Analysis Terkait Pemanfaatan Rapor Pendidikan Dan PBD Satuan Pendidikan
6. Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP
7. Bimbingan Teknis ARKAS/MARKAS Dan Sosialisasi Program SIAR pada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
8. Gebyar Gerakan Sekolah Sehat tahun 2024 (“BERGERAK BERSAMA UNTUK ANAK INDONESIA SEHAT, KUAT, CERDAS, DAN BERKARAKTER”)
9. Webinar Transisi PAUD ke SD
10. Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran transisi paud ke sd kepada dinas pendidikan dan kantor kementerian agama kabupaten/kota provinsi sumatera utara
11. Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait Platform SDS (ARKAS dan SIPLah) oleh UPT

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Dalam mengakses rapor pendidikan tantangan utama yang dihadapi satuan pendidikan adalah Jauhnya jarak tempat pendampingan (Dinas Pendidikan) dengan satdik dan sulitnya medan tempuh (air sungai pasang), Jaringan internet yang lemah, Kemampuan kepala sekolah yang kurang terhadap teknologi/internet/computer dan Untuk jenjang PAUD agak sulit penjelasan karena Rapor Pendidikan tahun pertama terbit.
2. Kegiatan PMO bulanan menghadapi berbagai kendala dalam mencapai target Pengisian RHK E-SKP Kepala Satuan Pendidikan dan Guru Tahun 2024, kendala dalam pembuatan SK ULD oleh dinas pendidikan daerah, penerbitan Juknis PPDB oleh pemda. Pembentukan Satgas TPPK dan Pengangkatan GP menjadi KS/PS.
3. Dalam mensukseskan gerakan sekolah sehat kendala utama yang dihadapi adalah Masih ada Satuan Pendidikan yang belum memenuhi sarat dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kgususny kamar mandi.

4. Masih ada sekitar 10 satdik/lembaga yang belum menggunakan ARKAS versi 4.0 atau di atasnya, dengan advokasi ini diharapkan dicapai 100%. tantangannya operator ARKAS nya masih baru dan sering berganti.
5. Kendala yang dihadapi dalam Transisi PAUD SD yaitu masih adanya miskonsepsi tentang kesiapan anak bersekolah, Forum Komunikasi PAUD-SD ada yang belum aktif, dan Pada saat PPDB SD masih mensyaratkan tes baca, tulis, dan hitung.

### **Strategis/Tindak Lanjut**

1. Solusi yang disarankan dalam permasalahan kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Kepada Satuan Pendidikan yang Belum Mengakses Rapor Pendidikan oleh UPT Jenjang PAUD, SD dan SMP yaitu Waktu pendampingan ditambah Dibantu dengan wifi Dinas dan pribadi dan Dibantu dalam penyusunan RTL oleh operator.
2. Strategi yang dapat ditempuh dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam mencapai target pada kegiatan PMO bulanan yaitu 1. Koordinasi Secara Intens dan berkala dengan Dinas Pendidikan melalui telepon dan *Whatsaap*, Advokasi dan Pendampingan terhadap Dinas Pendidikan, Advokasi dan Pendampingan Langsung kepada Satpen dan Wali wilayah terus berkoordinasi dengan daerah binaannya untuk memantau perkembangan dari target yang mau dicapai.
3. Agar dapat diintensifkan Gerakan Sekolah Sehat sehingga pemahaman dan Implementasinya menjadi maksimal yaitu sehat gizi,sehat fisik,sehat imunisasi, sehat jiwa dan sehat lingkungan.
4. Memberikan advokasi kepada satdik yang belum bisa menggunakan ARKAS Versi 4.0 atau di atasnya berupa BIMTEK
5. Solusi dalam menghadapi kendala Trasisi PAUD- SD yaitu antara lain 1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda PAUD memberikan pemahaman tentang kesiapan anak bersekolah dimulai secara bertahap, Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda PAUD untuk mengaktifkan Forum Komunikasi PAUD – SD dan Merujuk kepada Juknis PPDB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mensyaratkan tes baca, tulis, dan hitung dan sesuai dengan tiga terget perubahan dari Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

BPMP Provinsi Sumatera Utara telah mencapai beberapa hal pada kegiatan triwulan ini yaitu diantaranya Semua daerah sasaran 33 kabupaten/kota dan 1 Provinsi (100%) telah melaksanakan Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan Mei Tahun 2024 sesuai rencana yang telah ditetapkan. Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan bertambah pemahaman dan Pengetahuannya dalam hal peningkatan Kualitas kesehatan dalam mengimplemasikan pola hidup bersih dan sehat baik dirumah, sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan bertambah pemahaman dan Pengetahuannya dalam hal peningkatan Kualitas kesehatan dalam mengimplemasikan pola hidup bersih dan sehat baik dirumah, sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Satdik sudah 100% menggunakan ARKAS 4.0 atau versi di atasnya, untuk penyaluran dan pelaporan dana BOSP nya diharapkan mendekati 100%.

**2. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen ] IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)**

**Progress/Kegiatan**

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan indikator kinerja [IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Kegiatan yang telah dilakukan dalam periode April s.d Juni 2024 dalam upaya mendukung capaian IKK 1.2. yaitu:

1. Pelaksanaan Uji Petik Anomali Data Sarpras
2. Sosialisasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
3. Advokasi dan pendampingan percepatan penyaluran dana bos tahap I tahun 2024
4. Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah
5. Workshop Kebijakan Uji Kesetaraan
6. Pelaksanaan Pendampingan Kepada Satuan Pendidikan yang Belum Mengakses Rapor Pendidikan oleh UPT Jenjang PAUD, SD dan SMP
7. Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan Mei Tahun 2024
8. Pendampingan Supervisi / Visitasi Gerakan Sekolah Sehat ke Satuan Pendidikan Sekolah Binaan di 33 Kabupaten/Kota Tahun 2024
9. Advokasi Pemanfaatan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif dan Advokasi Peningkatan Kualitas Proses Pelaksanaan Kurikulum Merdeka bagi Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan
10. Advokasi Peningkatan Kualitas Proses Pelaksanaan Kurikulum Merdeka bagi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan
11. Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP
12. Pemantauan Pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK)
13. Gap Analysis Terkait Pemanfaatan Rapor Pendidikan Dan PBD Satuan Pendidikan
14. Pelaksanaan Pendampingan Kepada Satuan Pendidikan yang Belum Mengakses Rapor Pendidikan oleh UPT Jenjang SMA/SMK/SLB
15. Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP
16. Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS Tahun 2023
17. Bimbingan Teknis ARKAS/MARKAS Dan Sosialisasi Program SIAR pada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
18. Webinar Sosialisasi Pendaftaran IKM dan Festival Kurikulum Merdeka 2024
19. Webinar Sosialisasi Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024-2025 di Satuan Pendidikan
20. Webinar Pemanfaatan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di PMM
21. Pengolahan dan Analisis data hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK) tahun 2024.
22. Finalisasi laporan hasil analisis data pemantauan/monitoring pelaksanaan Uji Kesetaraan (UK) tahun 2024

23. Pendampingan Supervisi/Visitasi Gerakan Sekolah Sehat (GSS) Satuan Pendidikan Binaan Tahun 2024
24. Advokasi peningkatan kualitas proses pelaksanaan Kurikulum Merdeka bagi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (bulan April 2024)
25. Gebyar Gerakan Sekolah Sehat tahun 2024 (“BERGERAK BERSAMA UNTUK ANAK INDONESIA SEHAT, KUAT, CERDAS, DAN BERKARAKTER”)
26. Pemantauan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA
27. Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda Terkait SPM Pendidikan Oleh UPT
28. Workshop Pengimbasan oleh PSP Angkatan 1
29. Optimalisasi Pengawas Sekolah sebagai Pendamping Satuan Pendidikan
30. Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait Platform SDS (ARKAS dan SIPLah) oleh UPT
31. Pemantauan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP
32. Pemantauan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jnejang SD

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Kendala dalam kegiatan uji petik anomali data sarpas yaitu Operator sekolah belum paham tentang pengisian data sarpras di dapodik
2. Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah memiliki kendala yaitu Dinas pendidikan Kab/Kota dan Provinsi masih belum beradaptasi dengan kebijakan penggunaan Aplikasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dan Kuota dan indentifikasi promosi jabatan fungsional guru yang sudah ditetapkan di Aplikasi membuat Pemda enggan menggunakan aplikasi.
3. Permasalahan dalam kegiatan Advokasi dan pendampingan percepatan penyaluran dana bos tahap I tahun 2024 yaitu Ketidakcocokan data pada Kementerian keuangan dengan data dari operator pusat, Ada beberapa sekolah yang sudah tutup karena tidak ada lagi siswa yang mendaftar di Sekolah, Koneksi ARKAS dan MARKAS terkadang lambat dan Penginputan yang kurang teliti.
4. Waktu untuk merealisasikan pembentukan ULD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan belum disepakatinya kebutuhan adanya ULD di daerah.
5. Kegiatan Workshop Kebijakan Uji Kesetaraan banyak peserta yang tidak hadir.
6. Dalam penyaluran dan BOS Tahap I Masih ada beberapa satdik yang sudah rekom salur tahap-1 tahun 2024 namun belum aktivasi BKU bulan Januari tahun 2024.
7. Informasi kegiatan gebyar tidak bisa diterima oleh seluruh satuan pendidikan yang berada wilayah kota Medan yang bukan termasuk kedalam Sekolah Binaan GSS.
8. Waktu pelaksanaan PPDB jenjang SMP sangat beragam di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara, 18 kabupaten/kota telah melaksanakan PPDB online namun sebagian lagi masih offline
9. Tantangan Utama dalam PPDB jenjang SMA yaitu ada beberapa Cabdis belum membuat perhitungan daya tampung per sekolah; Masih ditemukan Masyarakat yang hendak melakukan kecurangan terhadap proses pendaftaran PPDB; Masih adanya perbedaan waktu penerimaan untuk beberapa Jalur

PPDB; Jalur Prestasi merupakan jalur pertama yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam Pelaksanaan PPDB.

10. Waktu pelaksanaan PPDB jenjang SD sangat beragam di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara, 8 kabupaten/kota telah melaksanakan PPDB online namun sebagian lagi masih offline.

### **Strategis/Tindak Lanjut**

1. Solusi dalam permasalahan uji petik anomaly data saptas yaitu Memberi bimbingan terhadap operator yang sekolahnya menjadi sasaran dan meminta dinas agar membimbing operator yang sekolahnya terdapat anomaly data saptas.
2. Strategi dalam mengatasi permasalahan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yaitu antara lain Diusulkan Penguatan kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Advokasi kenapa Guru Penggerak yang diangkat dan apa keuntungan mengangkat Guru Penggerak, Contoh atau *Best Practice* Pengangkatan Guru Penggerak yang ada di daerah lain dan Advokasi proses pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
3. Permasalahan dalam penyaluran Dana Bos Tahap I yaitu antara lain • BPMP menyurati Dinas Pendidikan agar dinas menyampaikan permasalahan ke Pusat sehingga Dana BOS segera salur ke Satuan Pendidikan, Ada Dinas pendidikan melakukan pendampingan bagi operator /Admin yang baru sehingga paham tentang MARKAS, Satuan Pendidikan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Cabang Dinas Pendidikan Provinsi dalam hal melakukan “konfirmasi dinas”.
4. Pemerintah daerah diberikan pemahaman yang memadai dan kesempatan untuk membahas hal-hal yang lebih teknis serta rinci mengenai perannya memfasilitasi penanganan pendidikan secara inklusif agar terbentuk persepsi yang sama dan kesediaan untuk membentuk ULD untuk memaksimalkan perannya.
5. Solusi dari peserta yang tidak hadir dalam Kegiatan Workshop Kebijakan Uji Kesetaraan yaitu Mengirimkan materi serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan yang menangani kesetaraan agar tersampaikan kebijakan Uji Kesetaraan.
6. Permasalahan dalam penyaluran dana BOS tahap I dapat diatasi dengan cara Advokasi agar satdik-satdik tersebut sudah bisa aktivasi BKU bulan Januari tahun 2024.
7. Solusi dalam penyelenggaraan Gebyar Sekolah Sehat Tahu 2024 yaitu mengundang beberapa satuan pendidikan yang dekat lokasinya dengan BPMP Sumut.
8. Solusi permasalahan PPDB jenjang SMP yaitu BPMP melakukan pemantauan langsung ke semua Kabupaten / kota di Sumatera Utara bersama Dinas Pendidikan di Kabupaten / kota; BPMP telah menyampaikan dan mensosialisasikan; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Keputusan Sesjen Kemendikbudristek No 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud 1 Tahun 2021; Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); Mengimbau Pemda agar semua daerah mengupayakan PPDB online; Mengimbau Pemda agar semua laporan dapat diselesaikan dengan baik.

9. Solusi dari permasalahan PPDB jenjang SMA yaitu BPMP melakukan pemantauan langsung ke semua kab/kota di Sumut bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas yang ada di wilayah Kabupaten Kota; BPMP telah menyampaikan dan mensosialisasikan 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021; tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, SK Sesjen 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan permendikbud 1 thn 2021, Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); Mengimbau Pemda agar semua laporan dapat diselesaikan dengan baik.
10. Untuk mengatasi permasalahan PPDB Jenjang SD dalam dilakukan langkah-langkah antara lain BPMP melakukan pemantauan langsung ke semua Kabupaten / kota di Sumatera Utara bersama Dinas Pendidikan di Kabupaten / kota; BPMP telah menyampaikan dan mensosialisasikan; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan; Keputusan Sesjen Kemendikbudristek No 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud 1 Tahun 2021; Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan; Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); Mengimbau Pemda agar semua daerah mengupayakan PPDB online; Mengimbau Pemda agar semua laporan dapat diselesaikan dengan baik.

Pada triwulan ke 2 ditahun 2024 beberapa hal yang telah dicapai dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung penacapaian indikator kinerja IKK. 1.2 yaitu Dinas Pendidikan Kab/Kota dan provinsi yang belum login Aplikasi Sistem Pengangkatan kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Provinsi Sumatera Utara. 1. Samosir, 2. Padang Sidempuan, 3. Dairi, 4. Nias Barat. 5. Nias Selatan. 6. Pakpak Bharat. sebanyak 25 Dinas Pendidikan Kab/Kota yang login ke aplikasi sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pemda yg sdh memulai seleksi pakai sistem ada 3 PEMDA yakni KOTA SIBOLGA , KOTA Gunung Sitoli dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemda yg sdh melakukan sistem secara utuh atau hingga finalisasi hanya 2 pemda yakni Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Penyaluran Dana BOS Tahap I Diharapkan 95% - 100% pada bulan Mei - Juni 2024. Dari 33 Kab/Kota sesumatera utara sudah 4 (empat) dari 33 daerah memiliki SK ULD.

Penyelenggaran Gebyar Sekolah Sehat tahun 2024 mencapai beberapa hal yaitu Tersampainya informasi dan tersebarluasnya Gerakan Sekolah Sehat agar dapat diselenggarakan dengan baik oleh seluruh peserta yang diundang sehingga mereka memiliki pemahaman tentang Gerakan Sekolah Sehat secara utuh dan bagaimana implementasinya. Terwujudnya sehat, kuat fisik dan karakter peserta didik sebagai implementasi Gerakan Sekolah Sehat dan terkampanyekannya Gerak Lagu Sekolah Sehat dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan Gebyar Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional yang dapat melibatkan PAUD, SD, SMP, SMA. Telah dilaksanakan acara Gebyar Gerakan Sekolah Sehat serentak secara hybrid. Acara tersebut diadakan secara daring terpusat dan luring yang dilaksanakan di masing-masing wilayah dan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut juga sebagai sarana untuk memberikan pesan-pesan penyemangat kepada peserta untuk menjalankan dan menyebarluaskan Gebyar Gerakan Sekolah Sehat

Pelaksanaan PPDB berjalan sesuai dengan Permendikbudristek No. 1 Tahun 2021, yaitu Objektif, Transparan dan Akuntabilitas. Informasi pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di satuan pendidikan berkaitan dengan Permendikbudristek/Juknis yang telah dikeluarkan oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten / Kota Se-Sumatera Utara. Penyelenggaraan PPDB SMA 90% Pemda melaksanakan sesuai dengan prinsip objective, transparan dan akuntabel ditahun 2024

3. **[SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara ] IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara**

**Progress/Kegiatan**

Nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 yaitu 84,05 dan mendapatkan predikat A atau memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 dan kelompok kerja. Untuk meningkatkan capain kinerja [SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dengan indikator [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara, Pada triwulan II Tahun 2024 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 yaitu :

1. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan program kerja Per PIC di BPMP setiap minggunya pada hari senin
2. Telah dilaksanakan pembentukan Komunitas Belajar Internal BPMP Provinsi Sumatera Utara
3. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi SAKIP Triwulan 2
4. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II
5. Telah dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Publik dalam upaya peningkatan layanan publik BPMP Provinsi Sumatera Utara

**Kendala/Permasalahan**

1. Dalam penerapan SOP pengumpulan data kinerja masih terdapat keterlambatan pengumpulan laporan dari para PIC kegiatan/program
2. Implementasi SAKIP masih harus diperkuat dengan melakukan usaha peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan

**Strategis/Tindak Lanjut**

1. Mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaporan kegiatan untuk menemukan solusi bersama.
2. Menjadwalkan program peningkatan kompetensi bagi tim SAKIP dan petugas yang menangani perencanaan termasuk operator aplikasi spasikita dan SAKTI

#### 4. **[SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara ] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara**

##### **Progress/Kegiatan**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP Provinsi Sumatera Utara Triwulan 2 Tahun 2024 yaitu 96,37 Dari 7 indikator penilain IKPA, BPMP Provisnis Sumatera Utara ada 3 indikator IKPA yang nilainya dibawah 100 dan masih perlu ditingkankan pencapaiannya yaitu:

1. Indikator Deviasi Hal DIPA 3 yang nilainya hanya mencapai 88,54
2. Indikator Penyerapan Anggaran yang nilainya hanya mencapai 92,05
3. Indikator pengelolaan UP dan TUP yang nilainya hanya mencapai 96,76

Untuk mengoptimalkan pencapaian IKPA perlu ditingkatkan pengawasan dalam hal Deviasi Hal DIPA 3, Pertanggungjawaban UP/TUP, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian data kontrak dan penyerapan anggaran sesuai dengan proyeksi penyerapan anggaran tahun 2024 yang telah disusun.

##### **Kendala/Permasalahan**

1. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan proyeksi yang telah disusun untuk tahun 2024 karena adanya pergeseran jadwal kegiatan dari tim kerja PDM.
2. Terdapat 3 indikator pada IKPA yang mendapatkan nilai dibawah 100 yaitu deviasi halaman III DIPA dengan nilai 88,47 Penyerapan Anggaran dengan nilai 92,05 dan pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 96,76.

##### **Strategis/Tindak Lanjut**

- a. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan tetap berkoordinasi dengan Tim kerja PDM terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Mengupayakan agar penyerapan anggaran sesuai dengan Proyeksi Halaman DIPA
- c. Meningkatkan pemakaian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk meningkatkan nilai dari indikator pengelolaan UP dan TUP
- d. Dalam hal meningkatkan nilai indikator penyerapan anggaran dapat dilakukan dengan cara mempercepat pertanggungjawaban agar SP2D terbit sebelum akhir bulan berjalan.

## 2. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[419523.DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	13.702	6840	6.862	25.697.125.000	8.798.454.635	16.898.670.365
[419523.DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	9.064	4532	4.532	553.552.000	412.208.000	141.344.000
[419523.WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	475.000.000	108.649.150	366.350.850
[419523.WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	26.486.216.000	12.402.785.501	14.083.430.499
[419523.WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	0	1	775.473.000	408.690.000	366.783.000
[419523.WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	0	224.527.000	223.525.876	1.001.124
<b>Total</b>					<b>54.211.893.000</b>	<b>22.354.313.162</b>	<b>31.857.579.838</b>

## 3. Rekomendasi Pimpinan

1. Komitmen melaksanakan program prioritas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk pencapaian IKK sesuai dengan perjanjian kinerja kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menindaklanjuti kendala/permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan selama triwulan 2 dan memilih solusi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memantau dan mencari peluang dan aspek-aspek yang dapat meningkatkan nilai EKA dan IKPA dengan berkoordinasi secara intens dengan KPPN Medan I dan Kanwil DJA Sumatera Utara.

Medan, 13 Agustus 2024  
BPMP Provinsi Sumatera Utara



BALAI PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI  
SUMATERA UTARA

Latuliden Idris, S.Si., M.T.  
NIP.197203302002121002